

Why Indonesia Needs a School of Journalism

Kristanto Hartadi

Reino R. Barack

Sirikit Syah

Sondang Anggraini

Aristides Katoppo

David C.L. Neller



Pornography

PERANG DIMULAI



“ Dari 38 DPC se-Jatim, 22 memilih saya. Ini bukti yang tak bisa diabaikan siapapun **”**

Soekarwo

Soekarwo-Sutjipto Sama-Sama Yakin Dipilih Megawati

SURABAYA-Kepada siapa rekomendasi calon gubernur (Cagub) PDIP diberikan? Masih belum jelas. Teka-teki itu dipastikan berakhir paling lambat minggu ini. Anehnya, meski rekam belum keluar, Soekarwo dan Sutjipto (kandidat Cagub PDIP), sa-

ma-sama mengklaim akan memenangkan pertarungan memperolehi tiket Cagub Jatim. Untuk menguatkan argumennya, kedua cagub beda profesi tersebut bersama pendukungnya, kemarin mulai memunculkan perang syarat atau jay war. Kubu Sutjipto misalnya,



menyebut Soekarwo hanya sebagai musafir yang numpang lewat di PDIP. Sementara pendukung Soekarwo menyebut Sutjipto tak layak menjadi cagub lantaran memudarnya kepercayaan para pengurus PDIP dan simpatikannya. Marika menyebut semasa menjadi pejabat negara, Sutjipto telah melupakan sejarah perjuangan PDIP.

Baktiono (salah satu orang dekat Sutjipto) menegaskan, DPP PDIP dan Megawati Soekarnoputri tidak akan menyukai pilihan lain, kecuali Sutjipto. "Haqul yakin, saya percaya Bu Megawati akan memilih Pak Tjip," tegas Baktiono.

“ Haqul yakin, saya percaya Bu Megawati akan memilih Pak Tjip **”**

Baktiono (Pendukung Sutjipto)

Baca Perang... hal 7

Berita Terbaru Baca
JATIM MANDIRI

Provocation

Mass Media Now

11 years of free press:
the number of media
institutions and journalists
increase; the quality of
journalism in is in question.

Mass Media Facts

- ✓ More than 80% of Journalists never read Journalist Code of Ethics; more complaints reported to the Press Council, more press cases in courts.
- ✓ Bad journalism is a good reason for government and politician to reduce press freedom (control the press).

Our Hypothesis

- ✓ Good journalism will be a good shield for press freedom;
- ✓ Good journalism starts in a good school of journalism, which is lacking in Indonesia;
- ✓ Good school of journalism will teach not only standard of practice but also ethics and philosophy of journalism.

Our Intervention

Start a new school of journalism that involves all three sectors (public-private-civil society).

The goals

- ✓ Short-term: to train and educate young generation of journalists.
- ✓ Long-term: to create an atmosphere of free and responsible press, which is essential for better Indonesia.

Sensing Journey

- ✓ Prototyping into this viable project



“We need to develop the competence of our journalists by way of training & education with new methods.”

Sigit Sutiyono

Managing Editor of Warta Kota



“We need a school of journalism to supply media industry with journalists who are not just skillfull, but are also equipped with knowledge and understanding of ethics.”

Sabam Leo Batubara,
Vice Chairman of the Press Council:

“I welcome the idea of creating a school of journalism. It could also monitor the process of democracy. The press should be in the front line to improve democracy by improving themselves.”



Surya D. Paloh
owner of Media Group
(Media Indonesia & Metro TV)



Rosihan Anwar
veteran journalist

“Journalists are the ones who should enforce and enact the code of ethics. The use of language should be given more attention.”

“Media people should listen more to the people who become their victims (objects of coverage).”

“Let’s not make the legislators regret for giving freedom to the press.”



Nono Anwar Makarim
senior lawyer and media observer



Margiono
Chairman of PWI

“The more people care about the press ethics, the better.”

“The existing courses of journalism are not bad, but we need something serious, a school.”

Three Sectors Dialog for A Better Indonesian Press



SENIN, 30 Maret 2009

SINAR HARAPAN LAPORAN KHUSUS

HALAMAN 15

Kemerdekaan Pers Harus Dijamin Konstitusi

Jakarta Masalah kebebasan pers di Indonesia adalah urusan sejarah panjang perjuangan bangsa ini dalam memperoleh kemerdekaannya. Ia lahir dari perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan, namun ketika kemerdekaan itu sudah tercapai, upaya memantapkan kemerdekaan pers ternyata juga hidup di kalangan pers sendiri (funding future) seperti ini.

Sekelompok itu adalah yang ditanggapi Wakil Ketua Dewan Pers, yang merupakan sebuah paper khusus untuk dialog kepada para peserta Dialog Tiga Sektor: Menteri Sosial Persoalan Pers di Indonesia.

"Pers bukan bangsa selama berhari-hari menambuh dan UU 1945, memanggong kemerdekaan Indonesia. Semua warga bangsa Indonesia harus segera merdeka dari penjajahan bangsa asing. Namun, ketika sampai kepada masalah kebebasan pers, mereka tidak bersedia memberi hak kepada warga negara untuk mendapat kemerdekaan pers. Padahal dengan hak itu rakyat dapat memanggong penjajahan oleh bangsa sendiri. Inilah buku perantara kemerdekaan pers kita," kata Leo.

Pandangan para tokoh bangsa yang tidak searah baik ingin memberi kemerdekaan pers itu muncul dalam rapat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 15 Juli 1945. Ketika itu para pembicara berpendapat antara lain Lili Kwan Huan-Miharsud Hetta dengan kata Soepomo-Soekarno.

Lili Kwan Huan adalah mantan pemimpin editorial di Yu Po. Kawan Hetta-Lian berpendapat kemerdekaan merupakan pikiran dan pendapat bukan semata-mata urusan kebebasan atau demokrasi.

Kemerdekaan pers akan memperoleh sistem pemerintahan demokrasi dan memanggong kebebasan sipil. Kelompok ini mengusulkan agar hak warga negara untuk mendapat kemerdekaan pers menjadi hak konstitusional dengan memantulkannya dalam UUD.

Namun, kata Soepomo-Soekarno memanggong konsep yang Hetta-Lian. Kalau kedua ini berpendapat hak tersebut merupakan pendapat semua Lili-Kwan berdasar dari kebebasan individuisme dan liberalisme serta kapitalisme, yang bertentangan dengan semangat kolektivisme (kollektif) sehingga mereka menolak memasukkan hal ini ke dalam batang tubuh rancangan UUD 1945.

Masalah Soepomo, hak warga negara memanggong



Wartawan
DIALOG TIGA SEKTOR-
Abdul Alimul, anggota Dewan Pers (Kiri) dan Lili Kwan Hetta (Tengah) dalam kegiatan Dialog Tiga Sektor pemerintah, swasta, dan civil society tentang pers yang diselenggarakan United in Diversity di Auditorium Departemen Perdagangan, Rabu (27/3).

■ Dialog Tiga Sektor:

Cari Solusi Persoalan Pers Indonesia

Pengantar

Sejak September 1999, pers di Indonesia memperoleh kebebasan dengan diundangkannya UU No 40 tahun 1999 tentang Pers. Namun, kemudian muncul sejumlah keluhan bahwa kebebasan ini belum dirangai rasa tanggung jawab dan profesionalisme sehingga muncul anggapan bahwa pers di Indonesia sudah kebablasan. Benarkah demikian? Sebuah dialog yang menghadirkan para wakil dari tiga sektor (pemerintah, swasta, dan civil society) yang merupakan pemangku kepentingan (stakeholder) pers digelar di Jakarta, pada 17 Maret lalu, bertempat di Auditorium Departemen Perdagangan. Dialog ini memunculkan

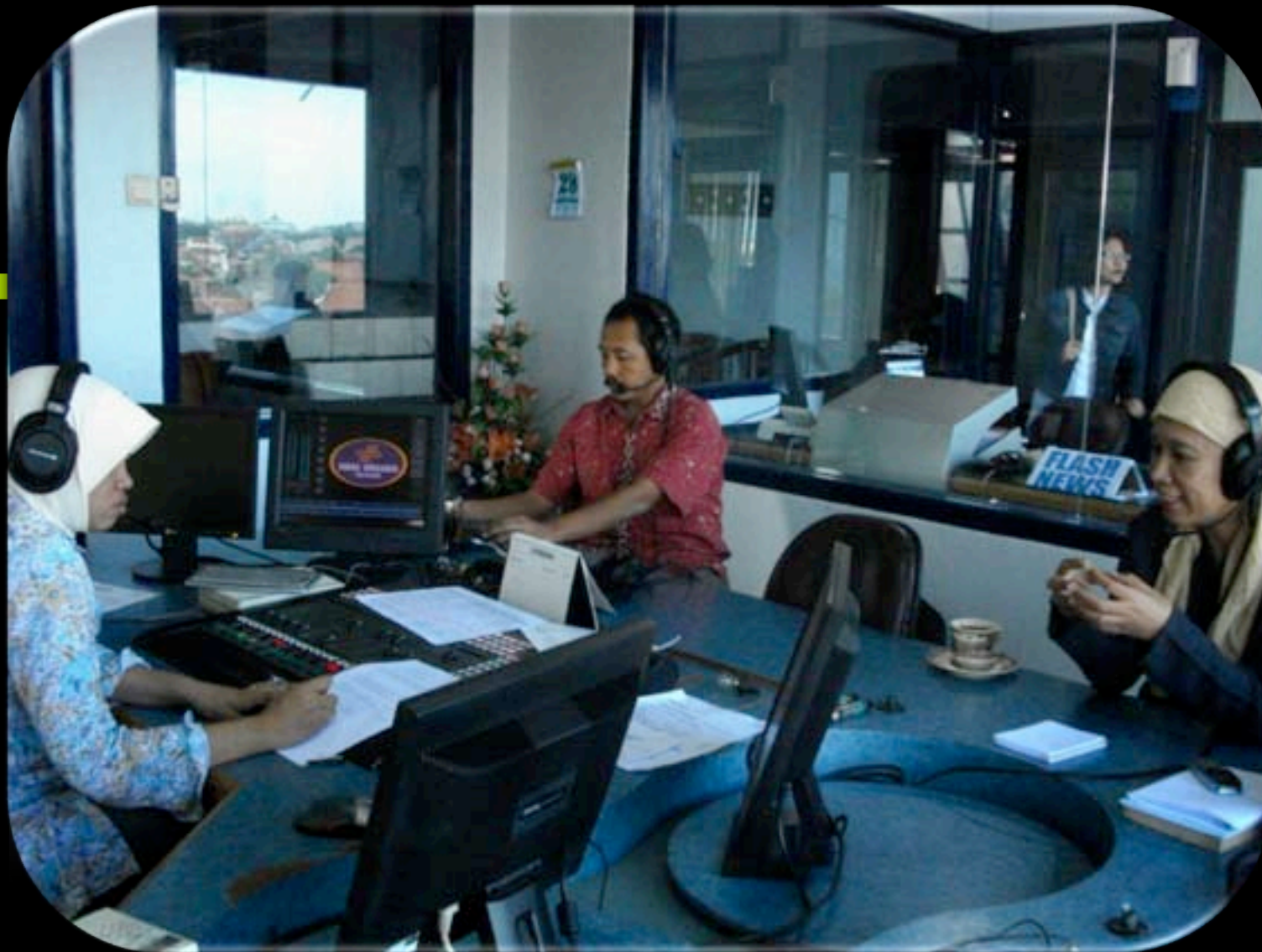
Grup, Endi Sumrat (LSM Lingkarpan Lela), dan Hana Puspita (pemerintah).

"Saya mendiskusikan pers di sini, dan kalau terdapat masalah, bukannya sudah pers memanggong masalahnya dan memanggong? Tidak perlu bukannya bukannya, yang penting pers memanggong memanggong pers pernah salah dan harus memanggong masalahnya dan bukannya pers memanggong pers di

demokrasi.

Pada sisi lain, kalangan pers ibaratnya ditangan Dewan Pers dan berbagai organisasi pers lain berjuang agar tidak terjadi bentuk pemanggong terhadap kebebasan pers dalam bentuk apa pun. Namun, pemerintah memanggong terhadap pers memanggong sejarah bangsa ini. Ujung-ujungnya lain memanggong reform of journalism, antara lain memanggong berbagai persyaratan hak

penting untuk memanggong reform ini. Banyak harapan ditanyakan kepada pers. Makin banyak bangsa, makin tinggi pula kebablasan. "Pers memanggong tidak memanggong," katanya. Dan berbagai pemanggong memanggong ini pers, di luar lain, adalah pemanggong berbagai-bagai pemanggong pemanggong, baik memanggong pemanggong, juga civil society telah itu kelompok JEL



Dialog between the media practitioners and the media consumers in a radio interactive program.

From here on

- ✓ Gather interests and supports from stake holders in this prototype.
- ✓ Draft a concept of the school curriculum with academics and the media industry.
- ✓ Meanwhile, create a one-year training program for journalists and news producers throughout Indonesia.



*“Support democracy,
believe in ethical
journalism”*



Thank you